

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menyongkong pembangunan daerah dan merupakan pemasukan yang potensial karena terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Salah satu fungsi dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah sebagai lembaga ekonomi. Pemerintah pusat sebagai lembaga ekonomi akan melakukan pengeluaran berbagai macam biaya untuk semua kegiatan operasional, sedangkan pemerintah daerah akan melakukan berbagai upaya untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi pengeluaran atas biaya tersebut. Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah.

Hakikat mendasar dari prinsip kebijakan otonomi daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah diberi kewenangan yang lebih besar untuk menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan penerimaan daerah. Sumber pendapatan asli daerah, menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah. Lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 meliputi: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Pendapatan asli daerah menjadi salah satu indikator kemandirian daerah dalam hal keuntungan, dimana semakin besar penerimaan dan prosentase pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah maka menunjukkan daerah tersebut semakin mandiri. Pemasukan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah, penerimaan dari dinas, bagi hasil pajak, pinjaman pemerintah dan lainnya memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah yang cukup penting, dimana pemasukan terbesar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di dominasi oleh sektor pajak. Penerimaan daerah bersumber dari pajak hotel dan restoran, pajak kendaraan alat berat, pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, pajak pengambilan air bawah tanah, pajak pengambilan air permukaan, sisa kewajiban pokok perseroan terbatas, kompensasi penggunaan lahan bagi penjualan kayu, pajak penjualan atas barang mewah, Pajak Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (PPHTB).

Dalam pendapatan daerah, pemerintah menetapkan suatu target yang harus dicapai. Jika pendapatan melebihi target tersebut, maka makan positif bagi daerah tersebut, dan jika sebaliknya jika pendapatan tidak mencapai target tersebut, maka

dapat berdampak buruk bagi daerah dan perlu dievaluasi penyebab kegagalan mencapai target yang telah ditetapkan. Pendapatan asli daerah merupakan aliran dana yang dapat memberikan manfaat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah Kota Yogyakarta berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan pemerintah daerah yang bersumber dari pajak daerah yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah tingkat I yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor, dikarekan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung saat mulai pendaftaran dan dibayar sekaligus dimuka. Pajak kendaraan bermotor ini akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor sebagai dampak dari peningkatan perekonomian masyarakat. Kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari, sehingga minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor sangat tinggi.

Kendaraan Bermotor merupakan objek pajak bagi Kota Yogyakarta yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pendapatan asli daerah, dimana penggunaan dari tiap tahun semakin meningkat. Hal ini dikarenakan semakin banyak *dealer* kendaraan bermotor dari berbagai perusahaan di Indonesia, terutama di Kota Yogyakarta. Dikarenakan semakin meningkatnya pengguna kendaraan bermotor maka akan menjadi keuntungan bagi pemerintah daerah dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia didapat informasi bahwa pada tahun pada tahun 2015 pembelian kendaraan bermotor mencapai 98.881.267, pada tahun 2016 mencapai 105.150.082, pada tahun 2017 mencapai 113.030.793 dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang signifikan nyaris 11,5%.

Kota Yogyakarta menduduki peringkat 4 dari daftar 10 kota termacet di Indonesia. Dengan meningkatnya kemacetan, pastinya karena jumlah kendaraan di Kota Yogyakarta yang semakin meningkat, peningkatan ini pun sudah diketahui oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Pertumbuhan kendaraan di Kota Yogyakarta meningkat secara drastis, dimana pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta tahun 2014 sampai tahun 2018.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2014 sampai Tahun 2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Sedan	8.375	8.022	7.371	6.898	6.540
2	Jeep	3.527	3.576	3.564	3.635	3.795
3	Mini Bus	30.539	33.020	34.779	37.215	39.755
4	Bus	985	942	909	938	935
5	Pick Up	5.835	6.020	5.997	5.907	5.797
6	Lt. Truck	1.769	1.839	1.757	1.829	1.816
7	Truck	352	346	312	225	214
8	Sepeda Motor	220.306	222.886	222.426	222.915	230.628
Jumlah		271.688	276.651	277.115	279.562	289.480

Sumber: SAMSAT Kota Yogyakarta

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap, yang dikenal dengan sebutan SAMSAT. Kota Yogyakarta telah menganggarkan pendapatan daerah dari bagi bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp. 11.543,30 miliar, dengan realisasi Rp. 4.137.02 miliar (35,84%).

Menurut peneliti sebelumnya, Siti Hayati (2018) dalam skripsinya mengemukakan dimana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung, sedangkan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung. Menurut N. Karina dan N. Budiarmo (2016) dalam *Jurnal EMBA Vol. 4 No. 1 Maret 2016, Gal. 715-722* mengemukakan dimana kontribusi yang diberikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah Provinsi Gorontalo adalah sedang, dimana belum berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo. Sedangkan menurut Putu dan Gayatri (2017) dalam *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* mengemukakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Bali dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Bali.

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan dan menurut beberapa peneliti sebelumnya yang menjadi alasan peneliti fokus pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Penulispun ingin mengetahui **“Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Tahun 2014 Sampai Tahun 2018”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Apakah kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) pada tahun 2014 sampai tahun 2018 ?
2. Apakah kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2014 sampai tahun 2018 ?
3. Apakah kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2014 sampai tahun 2018?

## **1.3 Batasan Masalah**

Dalam penulisan ini, penulis membatasi masalah yang diteliti, fokus masalah dalam penelitian ini adalah 5 komponen pajak daerah yang diteliti, penulis hanya mengambil 2 komponen pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

dan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) selama 5 tahun yaitu pada tahun 2014 sampai 2018, sehingga tidak dibahas sumber-sumber pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta yang lainnya.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi yang diberikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari tahun 2014 sampai tahun 2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi yang diberikan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari tahun 2014 sampai tahun 2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan atas kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2014 sampai tahun 2018.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Instalasi Pemerintahan  
Sebagai bahan masukan dalam mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap kontribusi Pajak Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta.

## 2. Bagi Penulis

Menambah wawasan mengenai kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta.

## 3. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadikan referensi khususnya untuk penelitian selanjutnya mengenai topik yang sama.

### **1.6 Kerangka Penulisan Skripsi**

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini dilakukan agar penelitian ini lebih sistematis dan teratur. Adapun sistematika penelitian sebagai berikut:

#### **Bab I      Pendahuluan**

Pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, batasan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan kerangka penulisan skripsi.

#### **Bab II     Landasan Teori**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang melandasi penelitian, meliputi: pajak, Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).



### **Bab III Metode Penelitian**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan instrument penelitian yang digunakan. Dimana penelitian ini akan dilakukan di SAMSAT Kota Yogyakarta, data yang dibutuhkan akan diperoleh melalui dokumentasi.

### **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini akan dibahas data-data yang telah peroleh dari hasil penelitian yang dilakukan di SAMSAT Kota Yogyakarta, dengan metode dan teknik analisis data yang telah diuraikan dalam metodologi penelitian.

### **Bab V Kesimpulan dan Implikasi**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh langkah-langkah proses pembahasan dan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta beberapa saran yang diharapkan dapat membantu dan berguna bagi pihak SAMSAT Kota Yogyakarta.